



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Faks. (0752) 66354
website: ptsp.agamkab.go.id

RENJA TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen / unsur, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Agam.

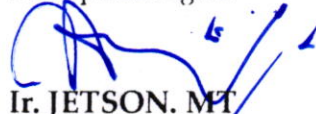
Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tahun 2016-2021, penyusunan Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari RENSTRA Dinas. yang di dalamnya terdiri dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun setiap tahun agar dapat dipedomani sebagai acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Ketenagakerjaan.

Rencana Kerjaini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Rencana Kerjaini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2020.

Lubuk Basung, September 2019

Kepala DPMPTSP- NAKER
Kabupaten Agam



Ir. JETSON. MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19640903 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP-NAKER Tahun Lalu 2018.	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi DPMPTSP- NAKER	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP-NAKER	31
3.3 Program Kegiatan	36
3.4 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	37
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2020 merupakan rencana pelaksanaan Renstra Tahun ke 4, Renja ini juga merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk periode satu tahun. Rencana tahunan ini menggambarkan program dan kegiatan OPD serta alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dari masing-masing kegiatan tersebut.

Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis OPD yang telah disusun sebelumnya, Rencana Kerja merupakan cara bagaimana mengimplementasikan dan mewujudkan target indiktar Renstra secara tahunan. Di samping itu penyusunan Rencana Kerja juga disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan. Ini berarti bahwa penyusunan Rencana Kerja adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang dan menengah yang akhirnya tertuang secara Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya, Rencana Kerja akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan

Dokumen Penggunaan Anggaran. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja ini berperan penting dalam penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Perubahan Organisasi Perangkat (Lembaran daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberi arahan dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun sehingga rencana kerja yang disusun tetap berada dalam koridor perwujudan Renstra Dinas Tahun 2016 s/d 2021 dan harus memperhatikan tujuan dan sarana dari RPJMD Tahun 2016 s/d 2021.

1.3.2 Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebagai implementasi dari renstra yang telah ditetapkan.
- Merumuskan Indikator dan Target Kinerja Tahunan.
- Merumuskan jadwal dan tata cara pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Merumuskan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA O P D
TAHUN LALU / TAHUN 2018
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP-NAKER
Tahun Lalu (2018)
 - 2.2. Capaian Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2018 Dengan
Target Renstra DPMPTSP- NAKER Tahun 2016 - 2021
 - 2.3. Analisis Pencapaian Keuangan tahun 2018.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP -NAKER
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.4. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan O P D
Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan bidang ketenagakerjaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam adalah "Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif, Berdaya Saing serta Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas", visi dimaksud mengacu kepada Visi Kabupaten Agam adalah "Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani"

Berdasarkan dan dengan mempedomani Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Tahun 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berpedoman kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2018. Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019 dan perkiraan capaian target tahun 2020.

Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang baik dan tepat sasaran serta alokasi anggaran

pembangunan yang menyentuh langsung kepada pelayanan publik. Kondisi keberhasilan pelaksanaan program dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja OPD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Agam Tahun 2018 dan DPA Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam telah dialokasikan anggaran belanja secara keseluruhan (Belanja Tdk. Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 5.930.747.269,- dengan realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 5.886.279.164,- atau sebesar 99,25%, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.315.675.850,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.294.458.949,- atau sebesar 99,08%, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.615.071.419,- dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.591.820.215,- atau sebesar 99,36%.

Hasil Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan komitmen dari semua unsur yang ada di Dinas untuk selalu mengawal schedule pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

2.1.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2018

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 Kabupaten Agam memiliki lima (5) Program dan tiga belas (13) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.516.478.150,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.504.553.999,00 atau 99,21%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan

realisasi keuangan pada 4 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa daana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.516.478.150,-		1.504.553.999,-	99,21
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	407.200.000,-	12 Bulan	407.141.575,-	99,98
2.	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	317.522.851,-	12 Bulan	317.280.852,-	99,92
5	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	459.978.324,-	12 Bulan	451.332.897,-	98,12
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	331.776.975,-	12 Bulan	328.798.675,-	99,10

B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri dari:

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 267.833.150,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 263.419.200,- atau 98,35%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 3 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan dan adanya efisiensi. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
I	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	267.833.150,-		263.419.200,-	98,35
1.	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	63.455.350,-	1 Laporan	62.226.850,-	98,06
2.	Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan	43.085.300,-	40 rang	43.030.100,-	99,87
5	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	161.292.500,-	32 orang	158.162.250,-	98,06

C. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 24.661.600,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 24.585.350,- atau 99,69%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada

1 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan efisiensi. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
I	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	24.661.600,-,-		24.585.350,-,-	99,69
1.	Fasilitasi Penyesuaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	24.661.600,-,-	30 kasus dan 30 perusahaan	24.585.350,-,-	99,69

D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 226.645.650,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 226.028.300** atau **99,73%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 4 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa daana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
I	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.516.478.150,-		1.504.553.999,-	99,21
1.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah	32.514.000,-	95 peseta	32.475.550,-,-	99,98
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	52.009.300,-,-	200 pelak usaha	51.790.650,-,-	99,62
3	Penyelenggaraan pameran Investasi	142.122.350,-	3x pameran	141.762.100,-	98,8

E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 280.057.300,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 275.872.100 atau 98,51%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 4 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa daana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Dan efisiensi belanja Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realsasi	
				Rp	%
I	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.516.478.150,-		1.504.553.999,-	99,21
1.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	77.151.800,-	30 kaus	75.942.300,-,-	98,98
2.	Operasional Pelayanan Perizinan	202.905.500,-,-	150x rapat, 100x survey dan 25x konsultasi	199.929.800,-,-	98,62

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang terutang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun system Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Kinerja penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat dalam Misi 2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan Profesional", dan Misi 5 (kelima) yaitu "Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif ”

Dari misi tersebut telah ditetapkan Tujuannya yaitu: “Penguatan tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”. Tujuan tersebut memiliki sasaran berupa:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sesuai dengan sasaran diatas ditetapkan indikator kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Fersentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10	10	10	11	12	13	50,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka		5,8	5,5	5,23	5	4,85	75

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan ditetapkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi <i>investasi</i> .								
Sasaran : 1.1. Meningkatnya Nilai Investasi								
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	1	2	3	4	5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA	300	350	487	500	550	600	60%

Tujuan 2 : Meningkatnya Operasional Pelayanan Perizinan								
Sasaran : Meningkatnya kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan								
No		Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	80	83	84	85	86	87	87
2	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	80%	80%	81%	82%	83%	84%	85%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja								
Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan								
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pengangguran terbuka		5,8	5,5	5,23	5	4,85	75
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		49%	55%	60%	65%	75%	
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		100 %	100 %	100%	100%	100%	

4	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi program bpjs ketenagakerjaan		61%	63%	62%	66%	68%	
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		32%	40%	55%	65%	75%	
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan		34%	40%	45%	50%	55%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Terkait dengan penentuan isu strategis, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam merupakan kantor yang masih muda usianya sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT yaitu analisis dari Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan di masa yang akan datang.

Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi dapat dilihat pada table dibawah 3.3.

TABEL 3.3
ANALISIS SWOT ISU STRATEGIS
DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN AGAM

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD	Kurangnya sarana dan prasarana, gedung kantor yang kurang kondusif	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan	Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali serta dukungan dari visi Kabupaten Agam sebagai pusat pelayanan yang berkualitas.
Adanya pelimpahan wewenang pelayanan ke DPMPTSP-Naker sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP-Naker	Kompetensi sebagian SDM sebagai fasilitator dalam pelayanan dan investasi masih terbatas.	Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberi pelayanan	Tersedianya teknologi informasi dari pusat untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
Adanya komitmen melaksanakan kebijakan mutu ISO 9001 : 2015	Kurangnya pengendalian terhadap penanaman modal dan calon penanaman modal	Sebagian masyarakat menganggap proses perizinan berbelit-belit	Adanya dorongan publik untuk menjadikan DPMPTSP-Naker menjadi institusi yang terpercaya

Adanya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan SKPD teknis	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan IT/aplikasi pelayanan masih kurang	Tersedianya peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pusat
Kabupaten Agam memiliki banyak potensi dan unggulan investasi	Masalah kepemilikan tanah ulayat yang rumit / kurang mendukung.	Kabupaten lain mempunyai SDA yang lebih baik	Investor PMA maupun PMDN masih berminat menanamkan modal di Agam
Adanya kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja	Anggaran kegiatan bursa kerja/jobfair tidak mencukupi	Meningkatnya angka Pengangguran	Bertambahnya wirausaha baru
Adanya Pembinaan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Kurang jumlah SDM untuk melakukan pembinaan Hubungan Industrial	Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta menurunnya angka Kecelakaan Kerja	Meningkatnya perselisihan hubungan industrial
Adanya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	Kurangnya sarana, prasarana dan instruktur pelatihan keterampilan yang memadai	Bertambahnya angka pengangguran	Melengkapi kebutuhan sarana, prasarana dan instruktur

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan tersebut maka strategi-strategi yang akan diambil kedepannya dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah :

1. Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu:

- a. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang kelembagaan baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadikan

institusi terpercaya sebagai fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas di Kabupaten Agam.

- b. Dengan adanya dasar hukum SDM, SDA serta sarana dan prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan informasi potensi dan unggulan kepada penanaman modal.
 - c. Dengan adanya dasar kewenangan dan komitmen yang kuat dari pimpinan merupakan kekuatan untuk melaksanakan aturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pusat.
 - d. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.
2. Kekuatan untuk menghindari Ancaman
- Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :
- a. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia, dukungan dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang penanaman modal dan PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi sebagai fasilitator pelayanan terpadu.
 - b. Sumber daya manusia yang ada harus komitmen menerpakan kebijakan mutu ISO 9001:2015 dan evaluasi yang berkesinambungan.
 - c. Melakukan temu usaha dalam rangka kerjasama, kemitraan dan proaktif dalam penggalian potensi dan unggulan investasi yang ada di kabupaten Agam.
 - d. Melaksanakan promosi potensi dan unggulan investasi serta membangun citra positif Kabupaten Agam Kepada investor yang kondusif dan bedaya saing.
 - e. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan.
 - f. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja.

3. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga mampu melaksanakan aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi berkualitas.

- b. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan kantor yang aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 - c. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebijakan, perizinan dan inventarisasi potensi dan unggulan investasi.
 - d. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjadikan institusi yang terpercaya.
 - e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
 - f. Menyempurnakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.
 - g. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini guna efisiensi dan efektif pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi informasi.
 - h. Memberi arahan, pengertian pada masyarakat tentang nilai positif adanya investasi, sehingga masalah tanah bias teratasi
 - i. Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Mengurangi Kelemahan untuk Menghindari Ancaman.
- a. Menambah sarana dan prasarana pendukung sehingga terciptanya kantor yang kondusif untuk pelayanan terpadu.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dengan pelatihan teknis sehingga mampu menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas, sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
 - c. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait dalam menerapkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen dan konsisten sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan.
 - d. Menerapkan prinsip bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai.

yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*).

- e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan perizinan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
- f. Melakukan fasilitasi antar investor PMA dan PMDN dengan masyarakat terkait peruntukan tanah untuk investor.
- g. Meningkatkan dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*Decent Work*) yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan social yang memadai.
- h. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesemoatan kerja.

2.3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan RPJM Kabupaten Agam tahun 2016-2021, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Tata Ruang maka permasalahan yang menjadi Isu-isu strategis DPMPTSP-NAKER adalah sebagai berikut :

1. Rumitnya masalah tanah ulayat.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Legalitas Usaha yang dimiliki.
3. Lapangan kerja terbatas.
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
5. Rendahnya penerapan peraturan tenaga kerja.

2.3.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (Renstra

OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (RENJA OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2020 disusun dengan mempedomani :

1. RPJPN tahun 2005 - 2025,
2. RPJMN 2014-2019,
3. RPJPD Propinsi Sumbar 2005 - 2025,
4. RPJPD Kabupaten Agam 2006 - 2025,
5. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2017 -2021,
6. Renstra Dinas Tahun 2017-2021.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Agam**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas			14.625.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas			14.625.000.000	
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DMPMPTS P NAKER	Indikator Output : Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi	12 Bln	475.000.000,-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi	12 Bln	475.000.000,-	
			Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran					Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran			
2	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : tersedianya Penunjang operasional Administrasi Perkantoran	12 bln	625.000.000	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : tersedianya Penunjang operasional Administrasi Perkantoran	12 bln	625.000.000	

			Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran					Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran			
3	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran	1 thn	625.000.000	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran	1 thn	625.000.000	
			Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran					Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran			
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : Indikator Outcome : Terpenuhinya secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 thn	12.285.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	DPMPTSP NAKER	Indikator Output : Indikator Outcome : Terpenuhinya secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 thn	12.285.000.000	
II	Program Peningkatan Kesempatan					Program Peningkatan Kesempatan					

	Kerja					Kerja				
5	Penyebarluasan informasi busra tenaga kerja		Indikator Output : Terlaksananya verifikasi data pencari kerja dan tersedianya informasi bursa kerja	1	300.000.000,-	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		Indikator Output : Terlaksananya verifikasi data pencari kerja dan tersedianya informasi bursa kerja	1	300.000.000,-
			Indikator Outcome : Tersedianya data tenaga kerja penganggur					Indikator Outcome : Tersedianya data tenaga kerja penganggur		
6	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan		Indikator Output : Terlaksananya sosialisasi dan bimtek pemagangan ke Jepang	1	441.200.000,00	Kerjasama pendidikan dan Pelatihan		Indikator Output : Terlaksananya sosialisasi dan bimtek pemagangan ke Jepang	1	450.000.000,00
			Indikator Outcome : Terfasiliatsinya tenaga kerja untuk melaksanakan pemagangan ke Jepang					Indikator Outcome : erfasiliatsinya tenaga kerja untuk melaksanakan pemagangan ke Jepang		

7	Padat karya Infrastruktur, Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri		Indikator Output : Terserapnya tenaga penganggur dan setengah penganggur	1	550.000.000,00	Padat karya Infrastruktur, Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri		Indikator Output : Terserapnya tenaga penganggur dan setengah penganggur	1	550.000.000,00
			Indikator Outcome : Menurunnya angka pengangguran					Indikator Outcome : Menurunnya angka pengangguran		
8	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai		Indikator Output : Terfasilitasinya Tenaga Kerja untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	1	450.000.000,-	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai		Indikator Output : Terfasilitasinya Tenaga Kerja untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	1	450.000.000,-
			Indikator Outcome : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja					Indikator Outcome : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		
C	Program Perlindungan Pengembangan					Program Perlindungan Pengembangan				

	Lembaga Ketenagakerjaan					Lembaga Ketenagakerjaan				
9	Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Ketenagakerjaan		Indikator Output : Terlaksananya pembinaan, penyelesaian kasus hubungan industrial dan PHK sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan	1	148.300.000,-	Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan		Indikator Output : Terlaksananya pembinaan, penyelesaian kasus hubungan industrial dan PHK sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan	1	148.300.000,-
			Indikator Outcome : Berkuranga kasus Hubungan Industrial					Indikator Outcome : Berkuranga kasus Hubungan Industrial		
D	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi					Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi				
10	Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil mwenengah		Indikator Output : Terwujudnya fasilitas Kemitraan Usha Kecil dan Menengah	12 bln	157.600.000,-	Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil mwenengah		Indikator Output : Terwujudnya fasilitas Kemitraan Usha Kecil dan Menengah	12 bln	175.000.000,-

			Indikator Outcome : Terlaksananya kemitraan usaha kecil dan usaha menengah					Indikator Outcome : Terlaksananya kemitraan usaha kecil dan usaha menengah		
11	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Indikator Output : Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	1 thn	80.000.000,00	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Indikator Output : Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	1 thn	80.000.000,00
			Indikator Outcome : Berkurangan Kasus Penanaman Modal					Indikator Outcome : Berkurangan Kasus Penanaman Modal		
12	Penyelenggaraan Pameran Investasi		Indikator Output : terlaksananya Terlaksananya Pameran Investasi	0	450.000.000,00	Penyelenggaraan Pameran Investasi		Indikator Output : terlaksananya Terlaksananya Pameran Investasi	0	450.000.000,00
			Indikator Outcome : Terlaksananya promosi produk					Indikator Outcome : Terlaksananya promosi produk		

			unggulan					unggulan		
E	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Indikator Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perizinan		80.000.000,00	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Indikator Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perizinan		80.000.000,00
			Indikator Outcome : Terselesaikannya permasalahan perizinan dan penanaman modal					Indikator Outcome : Terselesaikannya permasalahan perizinan dan penanaman modal		
F	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Daerah					Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Daerah				

14	Operasional Pelayanan Perizinan		Indikator Output : Terfasilitasinya proses pelayanan perizinan	1 thn	226.042.000,00	Operasional Pelayanan Perizinan		Indikator Output : Terfasilitasinya proses pelayanan perizinan	1 thn	226.042.000,00	
			Indikator Outcome : Terlaksananya pelayanan perizinan tepat waktu	1				Indikator Outcome : Terlaksananya pelayanan perizinan tepat waktu			
15.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		Indikator Output : Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan	10 kali	43.570.000,-	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		Indikator Output : Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan	10 kali	50.000.000,-	10 kali
			Indikator Outcome : Terlaksananya pelayanan perizinan tepat waktu					Indikator Outcome : Terlaksananya pelayanan perizinan tepat waktu			

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN AGAM**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan :								
	Bidang Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan								
	A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran guna mendukung pelayanan prima			1.099.079.000				1.881.486.900
	1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam kabupaten, dalam dan luar provinsi	Kab.Agam	12 bulan	0	APBD		12 bulan	327.500.000
	2 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan Administrasi Perkantoran / ATK Perkantoran	Kab.Agam	12 bulan	541.745.000	APBD		12 bulan	595.919.500
	3 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Tersedianya jasa dan bahan Penunjang Operasional Perkantoran	Kab.Agam	12 bulan	557.334.000	APBD		12 bulan	613.067.400
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab.Agam	12 bulan	0	APBD		12 bulan	345.000.000
	B Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar ,terlatih yang mendapatkan kesempatan kerja			372.050.000				1.009.055.000
	1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Pelaksanaan Job Fair , Jumlah data penganggur yg diverifikasi, laporan dan Informasi pasar kerja dan kesempatan kerja	Kab.Agam	1 kali, 424 org, 12 laporan	82.280.000	APBD		2800	90.308.000
	2 Kerjasama pendidikan dan pelatihan Kerja Mandiri	Jumlah peserta magang ke Jepang, dan Jumlah Tenaga kerja yang dilatih	Kab.Agam	100 org, dan 25 org	179.770.000	APBD		100 Org	197.747.000
	3 Penyiapan Tanaga Kerja Siap Pakai	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	Kab.Agam	32 org	110.000.000	APBD		180	121.000.000
	4 Padat Karya Ifrastruktur Pedesaan	1. Terserapnya tenaga kerja penanggur dan setengah penganggur, 2 Terciptanya wirausaha baru.	Kab.Agam	216	0	APBD		236	600.000.000
	C Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus sengketa tenaga kerja yang dituntaskan atau diselesaikan			50.401.000				55.441.000
	1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi, dan jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan	Kab.Agam	76 orang, dan 40 kasus	50.401.000	APBD		100 org 40 kasus	55.441.000

		D	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (Rp. Miliar)			459.718.700				505.438.070
		1	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah perizinan dan Non Perizinan yg diterbitkan, dan Jumlah Pesedrtta Sosialisasi	Kab.Agam	5800 perizinan dan non perizinan, dan 100 org	175.000.000	APBD		85%	192.500.000
		2	Peningkatan Kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Pengaduan yang tertangani,Peningkatan mutu melalui audit Survelance ISO 9001-2015	Kab.Agam	30 pengaduan, dan 1 paket	94.775.000	APBD		30 pengaduan 1 paket	104.000.000
		3	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran yang terikuti	Kab.Agam	2 kali	189.943.700	APBD		3 kali	208.938.070
			J U M L A H				1.981.248.700				3.451.420.970

Lubuk Basung, September 2019

Kepala Dinas

PMPTSP dan Ketenagakerjaan



Ir. JETSON, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19640903 199003 1 006

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja OPD selain merujuk kepada Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Agam tahun 2016 s/d 2021 juga harus memperhatikan kepada kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan harapan agar terbangun sinergitas perencanaan pembangunan dari skala Nasional, Propinsi sampai ke Kabupaten/Kota, sehingga program dan kegiatan OPD yang disusun betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu, penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2019 tidak terlepas dari kebijakan nasional dan provinsi.

Berdasarkan telaahan yang dilakukan, program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk tahun 2019 mendukung kebijakan nasional dan provinsi, seperti penyusunan kebijakan dibidang Penanaman modal dan Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal, pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,

Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, penyusunan dan pelaksanaan program promosi investasi, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal yang terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan O P D dalam 5 (lima) tahun kedepan :

1. Mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan yang Cepat, jelas, akurat dan transparan. Kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan juga akan ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang berkoordinasi dan berkomitment dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang cepat, akurat, dan transparan;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan menyediakan tempat pengurusan Perizinan satu atap satu pintu yang nyaman dan sarana prasarana yang memadai sertadipadukannya tempat pelayanan Perizinan dalam satu gedung, ini semua diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel. Dikumpulkannya semua pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal dalam satu unit Layanan berbentuk dinas diharapkan dapat terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasiserta tersosialisasikannya semua jenis Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat;
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Online (SPIPISE dan SMART SICANTIK) ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Agam, disamping itu persaingan akan semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota atau provinsi maupun negara : dimana hanya daerah-daerah kabupaten/kota atau provinsi ataupun negara

yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan secara elektronik yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi.

4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap pakai melalui pelatihan ketenagakerjaan, menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Agam maupun diluar Kabupaten Agam dalam penyerapan tenaga kerja dan menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Tujuan tersebut agar pengangguran berkurang, sehingga kemiskinan juga menurun dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Agam.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP-NAKER

Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi hak dan kesempatan generasi mendatang. Tantangan model pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan pembangunan ekonomi yang tidak menghancurkan lingkungan dan sistem sosial kemasyarakatan. Saat ini, tantangan yang ada adalah pembangunan ekologis yang mengharuskan pembangunan menghasilkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik.

Pada era otonomi daerah, pemerintahan daerah menjadi leading dalam pembangunan dan dengan kekuasaan dan kewenangan besar dalam kehidupan ekonomi lokal. Pembangunan berkelanjutan dan ekologis menuntut kerjasama sektor swasta dan masyarakat untuk mereformasi produk-produk dan pendekatan manajemen mereka, juga menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah cara kerja agar kerjasama mereka lebih dikelola baik. Reformasi ini harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dapat berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Perencanaan pembangunan daerah dibidang penanaman Modal dan Ketenagakerjaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 - 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2021 yakni:

**“Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif,
Sejahtera, Agamis dan Beradat Menuju Agam Mandiri,
Berprestasi Yang Madani”**

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2016 - 2021 dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra DPMPTSP dan NAKER yang dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati di bidang pengelolaan penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan, terkait dengan **misi kedua** RPJMD Kabupaten Agam 2016-2021 yaitu *menwujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean Governmance) dan ditambah professional, Misi Keempat* Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan dan **Misi kelima** yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.*

Misi ke. 2	:	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (<i>good and clean governance</i>) dan profesional
Tujuan 1	:	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Strategi	:	Implementasi UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Kebijakan	:	Optimisasi pelayanan perizinan satu pintu dan SOP perizinan
Misi ke 4	:	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Tujuan	:	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Sasaran	:	Meningkatnya Nilai Investasi
Strategi	:	Melaksanakan pemantauan, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal. Melakukan pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal
Kebijakan	:	Pembuatan dan perbaikan regulasi terkait penanaman modal. Memberikan peluang kepada investor untuk penanaman modal.
Misi ke 5	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif

Tujuan 1	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sasaran	:	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
Strategi	:	1. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja produktif 2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja
Kebijakan	:	1. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja. 2. Penumbuhan unit-unit usaha baru 3. Membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan melalui pendidikan dan latihan kerja. 4. Peningkatan hubungan industrial tenaga kerja. 5. Peningkatan perlindungan kepada tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016–2021, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis, dirumuskan Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan
- b. Memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi dan peluang investasi, serta jenis dan prosedur pelayanan perizinan di Kabupaten Agam
- c. Menerbitkan izin sesuai dengan aturan yang berlaku

- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan perizinan
- e. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan

Adapun Tujuan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentasi Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10	10	11	12	13
		Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA	350	487	500	550	600
		1. Meningkatkan kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan	Indek Kepuasan Masyarakat	83%	84%	85%	86%	87%
			Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja		Persentase Pengangguran terbuka	5,8	5,5	5,23	5	4,85

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi penting karena selain ajang promosi potensi dan peluang investasi daerah, beberapa event pameran investasi merupakan ajang untuk menunjukkan jati diri atau keberadaan pemerintah Kabupaten /kota, seperti Sumbar Expo, Invesda Expo, dan Gelar Potensi Investasi Daerah. Jadi setiap tahunnya, paling sedikit Kabupaten Agam hendaknya mengikuti 2 kali pameran investasi dalam provinsi dan 2 kali pameran investasi di luar provinsi.

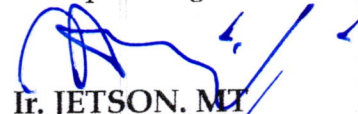
Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan penting karena meningkatkan kualitas, transparansi dan mutu dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Agam. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal penting karena diperlukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Agam

Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Danau Maninjau diperlukan karena promosi investasi harus didukung data yang akurat dan lengkap serta kepastian dalam berinvestasi.

Mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas diharapkan pada tahun 2020 didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Lubuk Basung, September 2019

Kepala DPMPTSP- NAKER
Kabupaten Agam



Ir. JETSON. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640903 199003 1 006